BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dua permasalahan diatas, penulis memiliki 2 kesimpulan berkaitan dengan penulisan tesis “Implikasi Status Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara pada Regulasi Keuangan Negara” antara lain :

1. Penetapan status pemerintahan daerah khusus di wilayah Ibu Kota Nusantara menimbulkan berbagai perubahan terutama di keuangan negara. Dikarenakan status pemerintahan daerah khusus tersebut berbeda dengan daerah khusus yang ada di Indonesia. Berbagai sumber anggaran termasuk APBN digunakan untuk pembangunan IKN dengan jumlah yang sangat besar.
2. Perbedaan cukup signifikan dalam pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 untuk pemerintah khusus Ibu Kota Nusantara. Terutama berkaitan dengan pelaksanaan regulasi keuangan negara (APBIKN -BMO). Serta belum berjalannya peraturan perundang-undangan pelaksana sebagaimana mestinya.

5.2 SARAN

Terdapat 2 (dua) saran yang diberikan oleh penulis terkait IKN yang saat ini berstatus sebagai Pemerintahan Daerah Khusus bila dikaitkan dengan regulasi

keuangan serta perbandingan pengaturan keuangan antara UU Nomor 3 Tahun 2022 dengan UU Nomor 21 Tahun 2023.

Saran pertama yaitu, kekhususan yang dimiliki IKN harus dikelola dengan baik melalui Otorita IKN yang seharusnya memiliki kewenangan secara utuh mengatur IKN terutama dibidang keuangan. Sehingga pemerataan perekonomian ke wilayah Timur Indonesia dapat tercipta. Saran kedua yaitu optimalisasi perturan perundang-undangan terutama di regulasi keuangan negara khususnya di wilayah Ibukota Nusantara menjadi satu hal mutlak. Terutama dengan pelaksanaan kebijakan seperti ABPIKN serta BMO yang bertahap diberlakukan maka peraturan perundang-undangan terkait wajib dilakukan sinkronisasi serta perubahan yang tetap didasarkan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.